

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pendidikan dipandang sebagai suatu sarana untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia suatu bangsa. Bangsa yang maju adalah bangsa yang peduli akan pendidikan dan dapat tergambarkan dari pencapaian pendidikan warga negaranya. Pencapaian pendidikan suatu bangsa dapat dilihat dari kesesuaian antara tujuan dan keterlaksanaan pendidikan. Pendidikan adalah salah satu kunci dalam meningkatkan taraf hidup sebuah masyarakat. Dalam Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa setiap warga negara berusia 7-15 tahun wajib mendapatkan pendidikan dasar. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab. Adapun fungsi nasional pendidikan adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu hal yang tidak dapat dilupakan dalam mencapai tujuan pendidikan suatu bangsa adalah peran negara dalam menyediakan sarana pendidikan. Menurut Siswoyo (2013:52) lingkungan dan sarana pendidikan merupakan sumber yang dapat menentukan kualitas serta berlangsungnya usaha pendidikan. Lingkungan tersebut dapat bersifat lingkungan fisik, sosial dan budaya yang semuanya memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap usaha pendidikan. Belum memadainya tempat pendidikan (gedung sekolah, sarana olahraga, dan rekreasi), perlengkapan, alat pendidikan, materi pendidikan, kurangnya kerja sama antara berbagai lembaga dalam masyarakat, rendahnya pendidikan penduduk serta biaya pendidikan yang relatif mahal pada umumnya dapat menghambat berlangsungnya pendidikan dengan baik. Salah satu peran negara dalam hal tersebut adalah dengan memberikan atau meringankan biaya pendidikan di Indonesia. Peraturan pemerintah (PP) No. 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) menjelaskan bahwa secara garis besar biaya pendidikan meliputi biaya investasi, biaya operasi, dan biaya operasional. Untuk mewujudkan amanah Undang-Undang tersebut maka pemerintah wajib menyelenggarakan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat dasar

yaitu SD, SMP dan SMA serta pendidikan yang sederajat. Beasiswa harus mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) peserta didik tingkat pendidikan dasar akan dibebaskan dari biaya operasional sekolah. Bantuan Operasional Sekolah yang langsung dikelola oleh sekolah melalui biaya untuk pendaftaran, iuran bulanan sekolah, biaya ujian, bahan dan biaya praktek. Biaya diatas tersebut tidak termasuk untuk biaya investasi seperti penyediaan sarana dan prasarana sekolah, gaji guru dan tenaga kependidikan lainnya, serta biaya peningkatan mutu guru.

Sebagai upaya untuk melaksanakan kewajiban menyediakan pendidikan dasar tanpa biaya, pemerintah menciptakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada awalnya BOS ini adalah bentuk kompensasi kenaikan bahan bakar minyak pada tahun 2005 dengan tujuan awal adalah ntuk mempercepat pencapaian program wajib belajar (wajib) 9 tahun. Akan tetapi mulai tahun 2009 pemerintah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS tersebut. Program BOS selanjutnya bukan hanya berperan untuk mempertahankan jumlah peserta didik saja, namun juga harus berkontribusi dalam meningkatkan dalam mutu pendidikan dasar.

Proses manajemen dilakukan oleh institusi secara konsisten dan terus menerus. Proses tersebut dilaksanakan oleh institusi yang bergerak dalam kegiatan yang berorientasi laba atau nirlaba. Institusi pendidikan yang mana bergerak dalam kegiatan nirlaba juga melakukan proses manajemen. Institusi pendidikan dituntut untuk melaksanakan proses manajemen yang optimal. Manajemen sekolah tidak dapat terjadi tanpa melibatkan sumber daya yang tepat. Manajemen yang baik melibatkan semua elemen dalam sekolah. Elemen yang dimaksud seperti guru, karyawan, siswa, dan yang lainnya. Sebagai penunjang kegiatan manajemen, sekolah memerlukan uang untuk melakukan rencana sekolah yang telah ditetapkan dalam periode tertentu. Uang yang beredar dalam sekolah sudah sepatutnya dikelola dengan baik berdasarkan peraturan yang berlaku. Hal ini ditegaskan dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia bahwa pengelolaan uang adalah pengelolaan kas dan surat berharga termasuk menanggulangi kekurangan kas dan memanfaatkan kelebihan kas secara optimal. Peraturan pemerintah tersebut juga menjelaskan bahwa sekolah sebagai institusi pemerintah diawasi oleh kepala sekolah dalam pengendalian internal dan pengawas fungsional daerah serta Badan Pemeriksa Keuangan dalam pengendalian fungsional.

Sekolah menempati posisi yang paling penting dalam penentuan penggunaan dana BOS, karena sekolah merupakan instansi yang terkait langsung dengan pengelolaan dana tersebut.

Menurut ketentuan dana BOS dikelola oleh kepala sekolah dan guru atau tenaga administrasi yang ditunjuk sebagai bendahara BOS, bagi pengelola tingkat sekolah pengelolaan BOS menjadi masalah yang serius, sekolah memiliki tugas untuk mengelola keuangan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan sehingga uang yang beredar dapat dimanfaatkan secara optimal. Proses manajemen keuangan sekolah yang baik dapat dilakukan oleh *stakeholder* yang baik juga. *Stakeholder* yang baik berupa pihak-pihak internal maupun eksternal sekolah yang berperan aktif dalam pengelolaan keuangan sekolah. Keaktifan *stakeholder* akan menunjang proses pengelolaan keuangan sekolah yang akan berpengaruh pada jumlah uang yang optimal. Jumlah uang yang optimal seperti uang yang tersedia sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh sekolah.

Pengelolaan keuangan sekolah didasari pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia No.48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan yaitu prinsip-prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Peraturan tersebut juga menjelaskan bahwa keempat prinsip tersebut digunakan dalam proses pengelolaan keuangan sekolah yang dimulai dari perencanaan, realisasi, penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan, pengawasan dan pemeriksaan hingga pertanggung jawaban. Peneliti memfokuskan penelitian ini pada pengelolaan anggaran dana BOS terhadap pelaporan keuangan sekolah pada tahap perencanaan dan realisasi anggaran penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan. Prinsip keadilan berkaitan dengan kesempatan yang diberikan seluas-luasnya kepada peserta didik dalam menerima pelayanan pendidikan, sedangkan prinsip efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya dalam memberikan pelayanan pendidikan melalui sekolah.

Dapat kita ketahui pendidikan di Indonesia sangatlah minim sekali terutama fasilitas sekolah ataupun sarana dan prasarana terutama sekolah yang berada di pedesaan maupun daerah terpencil. Seperti halnya fasilitas atau sarana dan prasarana Di MI MIFTAHUL ATHFAL 03 ini, hal ini bisa dilihat dengan kurangnya fasilitas kegiatan belajar mengajar, gedung kelas yang kurang, sanitasi yang tidak memadai, perpustakaan dan bangku sekolah yang rusak maupun tidak mencukupi. Padahal pemenuhan sarana dan prasarana merupakan salah satu standar nasional pendidikan.

Fasilitas sekolah atau sarana dan prasarana merupakan kegiatan penting yang perlu disiapkan secara cermat dan bekesinambungan sehingga kedepannya proses belajar mengajar terlaksana secara optimal, karena fasilitas sekolah atau sarana dan prasarana adalah salah satu sumber daya yang menjadi tolak ukur sekolah dan perlu peningkatan terus menerus seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih.

Proses pengelolaan keuangan sekolah yang meliputi perencanaan, dan realisasi anggaran diduga belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan sekolah yang meliputi keadilan dan efisiensi walaupun pada dasarnya konsep pelaporan antar negara bisa berbeda antara satu dengan yang lainnya dengan tingkat perbedaan yang bervariasi (Prihadi, 2012:04). Penggunaan prinsip keadilan yang dimaksud ketika menyusun RAPBS dan prinsip efisiensi ketika diterapkan secara internal berupa Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah, maupun secara eksternal dalam manfaat yang diterima serta biaya yang dikeluarkan oleh siswa apabila siswa bersekolah. Dana BOS yang digunakan untuk mengurangi biaya penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, membantu sekolah dalam meningkatkan kualitas karena dengan dana BOS, menambah fasilitas sarana dan prasarana sekolah berdasarkan sistem pengelolaan anggaran dana BOS terhadap pelaporan masing-masing sekolah. Proses pengelolaan keuangan sekolah berlandaskan pada Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional bab XIII. Berdasarkan latar belakang masalah, dana BOS di MI MIFTAHUL ATHFAL 03 digunakan untuk penyediaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan khususnya di MI MIFTAHUL ATHFAL 03 sebagai pelaksana program wajib belajar. Penggunaan dana BOS digunakan sesuai dengan petunjuk dan jukdis tentang anggaran penggunaan dan pelaporan sesuai dengan apa yang dibutuhkan pada ruang lingkup MI MIFTHAUL ATHFAL 03. Tujuan dari penggunaan dana BOS di MI MIFTAHUL ATHFAL 03 untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasi non personil sekolah yang masih dapat dibayarkan dari dana BOS, membebaskan pungutan biaya operasional sekolah bagi peserta didik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berdasarkan dari uraian diatas, maka peneliti bermaksud melaksanakan penelitian dengan judul **“ANALISIS REALISASI PENGELOLAAN ANGGARAN DANA BOS TERHADAP AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN DI MI MIFTAHUL ATHFAL 03 PARUNG TAHUN 2020”**. Motivasi peneliti dalam penelitian ini adalah peneliti telah

menemukan beberapa identifikasi permasalahan yang ada di MI MIFTAHUL ATHFAL 03 sehingga peneliti termotivasi untuk meneliti di MI MIFTAHUL ATHFAL 03 dengan tujuan ingin mengetahui bagaimana realisasi anggaran dana BOS di MI MIFTAHUL ATHFAL 03 pada tahun 2020 sehingga ditemukannya beberapa identifikasi masalah.

1.2. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana sekolah
- b. Proses realisasi keuangan sekolah yang meliputi perencanaan, dan realisasi anggaran diduga belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan sekolah.
- c. Banyak pihak yang belum melaksanakan analisis tentang pengelolaan dana BOS yang pelaksanaan pengelolaannya harus sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

1.3. Batasan Masalah

Dalam tulisan ini penulis berfokus hanya pada analisis realisasi pengelolaan anggaran dana BOS terhadap akuntabilitas dan transparansi sebagai alat pelaporan pertanggung jawaban keuangan di sekolah MI MIFTAHUL ATHFAL 03 tahun 2020.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana realisasi pengelolaan anggaran dana BOS dalam menciptakan akuntabilitas dan transparansi pelaporan pertanggungjawaban keuangan sekolah di MI MIFTAHUL ATHFAL 3 tahun 2020?”

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah “Untuk mengetahui realisasi pengelolaan anggaran dana BOS dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel dalam pelaporan pengelolaan pertanggungjawaban keuangan sekolah di MI MIFTAHUL ATHFAL 03 tahun 2020.

1.6. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbang terhadap ilmu ekonomi dalam kajian teoritis bagi akademisi terkait pengelolaan pertanggungjawaban keuangan di sekolah

2. Manfaat praktis

1) Bagi sekolah

Adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi dalam mengelolaa dana BOS yang baik agar terpenuhinya kebutuhan sekolah dan kualitas pendidikan yang baik.

2) Bagi masyarakat,

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan penilaian guna meningkatkan kepekaan social dengan berkontribusi untuk lebih bijak dalam menyikapi masalah dana disekolah.

3) Bagi instansi pemerintah

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan acuan dalam pengambilan kebijakan yang lebih bijak mengenai pemberian dana sekolah provinsi.

1.7. Sistematika Penulisan

Guna memahami lebih lanjut laporan ini, maka materi-materi yang tertera pada laporan proposal skripsi ini dikelompokan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori yang berupa pengertian dan definisi yang di ambil dari kutipan buku. , jurnal, dan skripsi yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data ,definisi operasional variabel dan teknik analisis data penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran objek penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan secara lebih lengkap mengupas berbagai fenomena yang ada dalam penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan simpulan yang merupakan hasil akhir atas penelitian ini dan juga saran bagi peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi tentang berbagai buku, jurnal, rujukan yang secara sah digunakan dalam penyusunan penelitian ini.